

Penelitian Agraria: Beberapa Gagasan dan Saran

Saat ini kondisi, kesempatan, dan tantangan baru yang berkembang telah banyak berubah, baik pada tingkat dunia maupun pada tingkat nasional kita sendiri. Dalam kaitan ini, apakah yang harus dikerjakan terutama di bidang studi akademik? Agenda-agenda penelitian yang bagaimanakah yang sebaiknya dikembangkan ke depan baik dalam kaitan dengan kebijakan negara maupun dalam konteks gerakan sosial di bidang agraria?

Berikut ini adalah beberapa cuplikan gagasan dan saran mengenai penelitian agraria dalam rangka mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai aspek masalah agraria dan reforma agraria.¹

¹ Dengan bentuk penyajian yang sedikit berbeda, pokok-pokok bahasan dalam bab ini telah dimuat dalam buku suntingan Moh. Shohibuddin (2009), *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: SAINS, PKA IPB, Departemen Sains KPM IPB. Uraian

A. Penelitian Agraria: Data Dasar Nasional

Salah satu faktor yang menentukan agar Reforma Agraria berpeluang untuk berhasil adalah tersedianya data yang lengkap dan akurat mengenai keagrariaan. Karena itu, seharusnya program RA didahului oleh suatu proyek penelitian besar-besaran secara nasional. Sebelum UU Agraria Kolonial 1870, pemerintah Belanda melakukan penelitian besar-besaran di 808 desa di Jawa. Begitu juga sebelumnya, di jaman pemerintahan Inggris, Raffles melakukan hal yang sama di Jawa sebelum menentukan kebijakannya. Demikian pula di Rusia dan Jepang, ketika melancarkan landreform, terlebih dulu mereka sudah memiliki data nasional yang lengkap dan teliti.

Sampai saat ini, di Indonesia memang sudah ada Badan Pusat Statistik (BPS), yang secara periodik sepuluh tahunan melakukan sensus dan survei. Tetapi sensus ini sifatnya umum, dan tidak dirancang dalam konteks persiapan RA.

Memang ada sejumlah studi yang dilakukan oleh perorangan yang berusaha memfokuskan kepada tema-tema yang relevan dengan RA, namun tentu saja sifatnya parsial karena kebanyakan hanya untuk kepentingan tertentu, seperti untuk kepentingan menulis Tesis S2 ataupun Disertasi S3. Tentu saja semuanya itu bukannya tidak berguna, jika dilihat dari perspektif studi ilmiah. Namun dalam perspektif kebijakan negara, sekali lagi, yang ideal adalah jika pemerintah pusat meluncurkan program penelitian nasional secara menyeluruh. Tetapi memang harus diakui bahwa hal itu memang berat karena

lebih rinci mengenai berbagai aspek terkait metodologi agraria dapat dibaca dalam buku ini.

memerlukan daya dan dana yang besar, tenaga terampil yang banyak, serta organisasi yang rapi, dan memakan waktu. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah melalui pentahapan, baik atas dasar tahapan waktu, atau atas dasar urutan daerah per daerah. Sekali lagi, semua itu yang penting adalah adanya kemauan politik.

B. Studi Agraria Menurut Sifat dan Konteksnya

Menurut sifat, tujuan dan konteksnya, semua penelitian pada umumnya (tidak hanya studi agraria) sebenarnya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Penelitian *akademik* konvensional. Sifat dan tujuan adalah akumulasi pengetahuan untuk pengembangan ilmu.
2. Penelitian yang *berorientasi kebijakan* (*policy oriented research*). Ini bertujuan untuk:
 - a) mempersiapkan, memberi masukan, ataupun mendukung suatu kebijakan pemerintah;
 - b) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah.
3. Penelitian *partisipatoris*. Ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

(Lihat, Rajesh Tandon, 1981; juga G. Wiradi; 1992)

Pada dasarnya kriteria untuk membedakan ciri-ciri tiga tipe penelitian tersebut di atas adalah masalah pengambilan keputusan mengenai tiga hal, yaitu: (a) pilihan tema; (b) pilihan metodologi; dan (c) pilihan bentuk publikasi.

Pada tipe akademik, pengambilan keputusan untuk semuanya itu ada di tangan si peneliti. Pada tipe kebijakan, pilihan tentang metodologi memang ditentukan oleh peneliti, tetapi

keputusan tentang pilihan tema dan pilihan bentuk laporan atau publikasi ada di tangan penentu kebijakan (terutama jika penelitian itu merupakan “pesanan”). Pada tipe partisipatoris, pengambilan keputusan mengenai semuanya itu merupakan konsensus antara si peneliti bersama semua pelaku yang terlibat dalam permasalahan.

Dalam konteks *gerakan sosial*, jelas bahwa studi yang paling cocok adalah tipe penelitian partisipatoris (partisipatif). Walaupun demikian, menurut saya, tipe akademik tetap diperlukan agar hasilnya dapat saling mengisi dan/atau saling mengoreksi. Demikian juga studi-studi dalam konteks kebijakan negara.

Bagi studi-studi kebijakan, khususnya yang bersifat *monitoring and evaluation*, ada satu hal yang layak dicatat. Pada tahun 1978, UNRISD (Lembaga Penelitian PBB) menerbitkan buku *Systematic Monitoring and Evaluation*, sebagai hasil dari 164 lokakarya internasional di berbagai negara. Isinya mencerminkan hanya satu model pendekatan yaitu “System Analysis Approach” (SAA). Barangkali, karena buku ini diterbitkan oleh badan PBB, maka SAA lalu menjadi semacam “buku suci” bagi studi evaluasi terutama bagi lembaga-lembaga penelitian pemerintah (Lihat, G. Wiradi, 1992).

Padahal, satu tahun sesudah terbitnya buku itu, yaitu pada tahun 1979, di North Dakota Amerika Serikat telah berkumpul berbagai pakar di bidang studi evaluasi untuk berdiskusi mengenai masalah “pendekatan”. Dari situ terungkap bahwa ternyata terdapat beragam pendekatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi delapan model, dan SAA hanyalah salah satu dari padanya (untuk uraian yang rinci ten-

tang delapan model itu, lihat: Patton, 1982). Bahkan ada sekelompok pakar yang membebaskan diri dari “model” dan mementingkan strategi di dalam melakukan studi evaluasi. Mereka menyebutnya “beyond models”.

Mengingat bahwa masalah agraria itu cakupannya luas (artinya, terkait dengan banyak aspek lainnya), maka walaupun yang dievaluasi itu hanya mengenai aspek tertentu saja dari satu kebijakan tertentu, menurut saya “beyond models” merupakan pendekatan yang sesuai.

C. Sedikit Tentang Metode

Apakah ada metodologi tertentu, yang khas untuk studi agraria? Sebenarnya dapat dikatakan tidak ada yang khas, sebab prinsip-prinsip umum metodologi penelitian tetap berlaku bagi studi-studi agraria. Hanya saja, memang ada beberapa pendekatan ataupun metode dan teknik pengumpulan data di lapangan, yang belum lazim dilakukan (atau bahkan belum dikenali) oleh peneliti-peneliti Indonesia.

Untuk menjelaskan hal itu, ada dua hal saja yang perlu diuraikan secara ringkas di sini, sekedar untuk menambah wawasan.

Yang pertama, berkenaan dengan pendekatan atau metode atas dasar kubu teori tertentu mengenai perubahan agraria. Misalnya, kubu teori neo-populis membuat proposisi bahwa yang terjadi di pedesaan itu bukannya “diferensiasi kelas” melainkan “diferensiasi demografis”. Pertanyaannya, bagaimanakah mengidentifikasi terjadinya diferensiasi demografis? Kita belum pernah menelaah, kubu teori dari para ilmuwan Marxist melihat dinamika dalam masyarakat pedesaan sebagai proses terjadinya diferensiasi kelas.

Bagaimanakah metodenya untuk melihat hal ini? Mari kita coba membandingkan.

Untuk memahami masalah “diferensiasi demografis”, biasanya dilakukan studi yang mengambil tema *mobilitas vertikal* dalam konteks *stratifikasi sosial* (lihat, antara lain D. Thorner, 1978; juga Chayanov dalam Shanin (ed), 1973). Sedangkan dalam kubu Marxian yang biasa melakukan analisa “kelas”, telah dikembangkan beberapa metode, dari yang paling sederhana (misal: “*skema Roemer*”) sampai yang cukup rumit (misal: “*E-Criterion*” dari Ufsa Pafnaik). Kecuali peneliti asing, saya kira para peneliti Indonesia belum ada yang menggunakan metode-metode tersebut, atau bahkan memang belum mengenalinya. (Untuk mengenali metode-metode tersebut, lihat, antara lain, Atiur Rahman, 1986.)

Hal kedua yang barangkali dianggap khas studi agraria, sebenarnya hanyalah masalah sederhana karena hanya menyangkut soal teknis mengenai “*sampling frame*” dan “*sampling unit*”. Karena itu maka hal ini sebenarnya tidak tepat disebut “khas” karena hal yang sama juga bisa dipakai dalam studi-studi lain. Studi-studi dalam ilmu-ilmu sosial, baik kuantitatif maupun kualitatif, seringkali mendapat kritik dari para peneliti bidang teknis karena, katanya, sumber datanya mengandalkan pada wawancara, sehingga informasi mengenai hal-hal yang bersifat fisik seringkali tidak benar atau kurang tepat (misalnya: soal luas tanah, jumlah hasil pertanian dan lain sebagainya).

Sebenarnya, dalam teori metodologi penelitian sosial, hal itu juga sudah diantisipasi, dan karenanya masalah validasi hasil wawancara juga sudah merupakan satu topik pembahasan

dalam buku-buku metodologi. Namun untuk menanggapi kritik tersebut, maka dalam studi agraria (khususnya survey kuantitatif), lalu ada alternatif, yaitu “sampling frame”-nya dan unit sampelnya bukan orang tetapi “*peta* petak tanah”. Jadi satuan sampelnya adalah petak-petak (pemilikan ataupun garapan, tergantung pada tujuannya). Setelah petak-petak itu terpilih, barulah ditanyakan siapa pemilik/penggarapnya untuk kemudian diwawancarai. Tentu saja metode ini ada implikasinya, yaitu bahwa hasilnya merupakan representasi dari tanah pertanian, bukan representasi dari kelompok orang. Jika ingin cermat, tentu saja hal ini bisa dan perlu dikombinasikan dengan metode biasa yang satuan sampelnya orang atau rumah tangga. Jika sebagian besar sampel petak tanah kebetulan jatuh sama dengan sampel orang/rumahtangga, tentu hasilnya akan lebih bagus lagi.

D. Agenda Ke Depan

Setelah berakhirnya era Orde Baru saat ini, kondisi dan situasi, kesempatan, dan tantangan bagi pengembangan studi-studi agraria tentu saja sangat berbeda, baik dibandingkan dengan masa Orde Baru maupun dibandingkan dengan masa sebelumnya. Di satu sisi, sekarang ini sudah ada suasana keterbukaan. Lepas dari isinya, pemerintah pun sudah mencanangkan niat politik untuk melaksanakan program pembaharuan agraria. Organisasi rakyat (tani, nelayan, dan lain-lain) juga sudah bermunculan. Tetapi di sisi lain, kondisi lingkungan alam sudah terlanjur rusak berat, akibat kebijakan “rumah terbuka” yang ditempuh selama Orde Baru. Bahkan bukan hanya lingkungan alam, lingkungan sosial pun rusak

berat. Konflik sosial terjadi di mana-mana. Rasa kebersamaan telah terganti oleh semangat persaingan individualistik, sebagai akibat kampanye globalisasi ekonomi dengan segala dampaknya. Narkoba merajalela, kriminalitas meningkat. Hampir semua bidang dikomersilkan, termasuk komersialisasi ilmu pengetahuan. Ditambah lagi berbagai kasus korupsi oleh pejabat mulai banyak yang terungkap. Sementara itu dampak ikutan dari kerusakan lingkungan alam adalah terjadinya berbagai bencana (banjir, tanah longsor, dan lain-lain). Di samping semua itu, adanya UU Pemerintahan Daerah yang baru juga telah melahirkan berbagai keributan sekitar proses pilkada di berbagai daerah.

Diakui atau tidak, itulah gambaran masyarakat kita dewasa ini. Sebenarnya, kondisi yang demikian itu justru dapat mengundang rasa keingintahuan (*curiosity*) bagi para peneliti yang serius, di bidang apa saja. Namun dalam konteks buku ini, pertanyaannya adalah, di tengah situasi yang demikian itu, studi agraria yang bagaimanakah yang layak dijadikan prioritas? Terutama dalam rangka mendorong dan menopang pelaksanaan reforma Agraria, topik-topik apa saja yang perlu menjadi agenda penelitian ke depan?

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kita ingat tentang tiga macam tipe penelitian yang telah diuraikan di atas. Tetapi di samping itu, ada satu hal lagi yang lebih dulu layak dikemukakan, yaitu bekal bagi peneliti pemula.

1. Studi Agraria Untuk Pemula

Secara umum, karena masalah agraria adalah kompleks, maka penelitian mengenai agraria itu dapat mencakup puluhan

macam topik, tergantung dari tujuan dan minat si peneliti. Tetapi terutama bagi peneliti pemula, harus disadari bahwa minimal ada dua tema besar sebagai dasar, yang dari sini dapat diteruskan atau dikembangkan menjadi sub-sub tema lebih lanjut. Dua tema besar itu adalah:

1. “*Land tenure pattern*” atau pola pemilikan tanah. Ini mencakup data tentang jenis status hak pemilikan, jenis penggunaan tanah, dan sebaran (distribusi) pemilikan tanah.
2. “*Land tenancy pattern*” atau hubungan penggarapan tanah. Artinya, ini mengenai masalah kelembagaan atau aturan-aturan setempat mengenai penggarapan tanah yang bukan milik penggarapnya (sewa, gadai, bagi-hasil, “kedokan”, dan lain sebagainya). Padanan dalam bahasa Indonesia untuk istilah “*tenancy*” memang belum baku. Saya menggunakan istilah “penyakapan”, tapi banyak orang lain yang menggunakan istilah penyakapan itu hanya untuk mengacu kepada “bagi-hasil”.

Baik soal “*tenure*” maupun soal “*tenancy*” itu juga berlaku bagi masalah air, karena air adalah bagian dari agraria. Demikian pula, kedua masalah itu juga berlaku bukan saja di kawasan usaha tani tanaman pangan, tetapi juga di kawasan sekitar perkebunan dan kehutanan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai masyarakat adat yang sangat beragam, dan karenanya pola atau bentuk-bentuk “*tenancy*”-nya pun amat beragam. Bahkan dalam satu masyarakat adat bisa terdapat bentuk-bentuk penyakapan yang bermacam-macam pula.

Atas dasar semua itu, menurut pendapat saya sepanjang masyarakat kita masih bersifat “agraris”, maka dari jurusan

ilmu apa pun, setiap peneliti agraria seharusnya memahami dengan baik dua masalah tersebut di atas, yaitu “*land tenure*” dan “*tenancy relations*”. Dua hal ini memang saling berkaitan. Tetapi untuk pengambilan data di lapangan, masalah hubungan-hubungan penyakapan (*tenancy relations*) relatif lebih rumit dibanding masalah pola pemilikan tanah (*land tenure*).

Untuk membantu para peneliti pemula yang akan melakukan studi lapangan mengenai masalah “*tenancy*”, enam pertanyaan pokok berikut ini dapat dipakai sebagai pedoman awal.

1. Apakah di lokasi penelitian ada praktek-praktek penyakapan? Jika ada, apa saja ragamnya, dan apa istilah-istilah setempat yang lazim digunakan?
2. Tanah yang bagaimana (statusnya, kondisinya) yang biasa tersedia bagi penyakapan?
3. Siapa pemilik tanah tersebut?
4. Siapa yang menjadi penggarapnya?
5. Jenis tanaman apa saja yang biasanya disakapkan?
6. Aturan-aturan hubungan kerja yang bagaimana yang biasanya diberlakukan? (misal: apa kewajiban dan hak masing-masing pihak, pemilik tanah maupun penggarap).

Perlu juga ditambahkan bahwa karena dalam masyarakat agraris itu isu agraria berkaitan dengan isu kemiskinan, maka terutama bagi peneliti pemula, perlu dipahami adanya beberapa *pertanyaan dasar* dalam studi kemiskinan, yaitu:

1. *Siapa* mereka (orang miskin) itu? Di balik kata “*siapa*” ini tercakup berbagai hal yang menuntun kita untuk dapat membuat kategorisasi kelompok miskin atas dasar

berbagai ciri yang berbeda-beda.

2. *Di mana* mereka tinggal? Ini bukan sekedar alamat rumah, melainkan berkaitan baik dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial.
3. *Mengapa* mereka miskin atau menjadi miskin?
4. *Program apa saja* yang pernah dilakukan oleh pemerintah (maupun oleh lembaga non-pemerintah) untuk mengurangi kemiskinan dan bagaimana persepsi orang miskin itu sendiri terhadap program-program tersebut?
5. Sekalipun sudah banyak program penanggulangan kemiskinan, mengapa mereka (orang miskin) itu *tetap miskin*?

Dari lima pertanyaan dasar itulah nanti hasilnya dapat dipakai sebagai titik tolak untuk mengembangkan tema-tema khusus lebih lanjut.

2. *Studi Agraria: Perspektif Akademis*

Seperti telah disinggung di depan, dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, masalah agraria itu dapat dirinci menjadi puluhan macam topik. Juga telah disinggung di depan bahwa baik dalam “*policy oriented research*”, maupun dalam konteks gerakan sosial, studi yang bersifat akademik (yang konvensional sekalipun) tetap diperlukan. Menurut saya, dari segi akademik, yang penting ke depan ini adalah mengembangkan metode-metode alternatif seperti yang saya uraikan di depan.

Adapun topik-topik penelitian agraria dari perspektif akademis jumlahnya bisa mencapai puluhan topik. Lokakarya Internasional di Selabintana, Sukabumi tahun 1981, menghasilkan “*Research Agenda*” yang menyarankan 46 topik utama

dan sejumlah sub-topik penelitian. Hasil-hasil penelitian ini (seandainya dapat dilaksanakan) diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan program Reforma Agraria. Tentu saja, dari sejumlah besar topik-topik itu diperlukan adanya skala prioritas, data apa saja yang paling utama diperlukan lebih dahulu.

Penentuan prioritas ini sebenarnya juga tergantung dari situasi dan kondisi di masing-masing negara. Namun jika ditarik pada konteks di Indonesia, puluhan topik ini sebenarnya bisa diperas dan ditapis menjadi 14 topik sebagai berikut.

1. Inventarisasi peta-peta tanah, catatan-catatan pajak tanah, daftar pemilikan tanah, dan data sekunder lainnya.
2. Analisa mengenai susunan sebaran pemilikan tanah, penguasaan tanah, dan penggunaan tanah, yang dihubungkan dengan susunan sebaran pendapatan (baik dari pertanian, non-pertanian, maupun total).
3. Analisa mengenai sifat dan tingkat fragmentasi tanah.
4. Analisa mengenai keragaan sosial-ekonomi berbagai jenis satuan usahatani.
5. Stratifikasi sosial-ekonomi atas dasar penguasaan tanah dan penggunaan tenaga kerja.
6. Analisa mengenai kedudukan dan sikap berbagai kelompok (organisasi sosial politik, LSM, birokrat, militer, dan kelompok kepentingan lainnya) terhadap gagasan Reforma Agraria.
7. Mekanisme perolehan tanah/pembebasan tanah, baik bagi kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan swasta.
8. Konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian

(termasuk lajunya dan dampaknya).

9. Investasi dalam tanah oleh kelompok-kelompok pengusaha non pertanian.
10. Komposisi, perilaku, dan hubungan sosial di antara pemilik tanah, dan antara pemilik tanah dan tunakisma, dalam masyarakat pedesaan.
11. Persepsi rakyat setempat mengenai hak-hak atas tanah dan fungsi tanah (nilai-nilai budaya yang melekat pada kepemilikan dan kekuasaan tanah).
12. Sifat, jenis atau pola, dan luasnya sengketa tanah dan konflik agraria secara umum.
13. Mekanisme pendaftaran tanah dan pengukuran tanah (baik yang dilakukan oleh instansi resmi maupun yang pernah dilakukan menurut kebiasaan rakyat sendiri).
14. Reforma agraria dan prinsip-prinsip hukum adat.

Keempat belas topik itu semuanya penting! Namun dari jumlah itu, tiga topik yang disebut pertama merupakan prioritas utama. Sisanya bisa diubah-ubah urutan prioritasnya, juga bisa digabung-gabungkan, tergantung dari tujuan penelitian, dari kondisi setempat, dan dari kemampuan yang ada pada peneliti.

3. Studi Agraria: Dalam Konteks Gerakan Sosial

Yang dimaksud dengan gerakan sosial di sini adalah gerakan sosial di bidang agraria, dan hal ini pernah saya rumuskan sebagai: “suatu usaha, upaya dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama, dengan tujuan untuk merombak tata sosial di bidang agraria, karena tata yang ada dianggap tidak adil dan tidak sesuai sebagai dasar bagi peningkatan kesejah-

teraan rakyat” (lihat G. Wiradi, 2009b: 142).

Di antara ciri-ciri yang lain, salah satu ciri yang paling utama dalam gerakan sosial baru adalah bahwa kegiatannya bukan lagi merupakan kegiatan yang dilakukan secara eksklusif oleh salah satu kelompok, melainkan kerjasama dalam bentuk *jaringan*. Kerjasama itu tentu saja berlangsung di antara berbagai kelompok yang merasa mempunyai tujuan sama, yaitu untuk mewujudkan Reforma Agraria yang “genuine”. Ini termasuk siapa saja yang peduli dan memihak kepada kepentingan petani kecil, buruh tani, dan rakyat miskin pada umumnya. Walaupun demikian identitas kelompok tetap diperlukan sebagai ungkapan rasa senasib dan sehaluan. Inilah dasar bagi terbangunnya rasa solidaritas.

Itu semua berarti bahwa suatu “gerakan Reforma Agraria” dapat berupa kerjasama antara gerakan rakyat dan pemerintah jika kebijakan pemerintah itu memang merupakan niat politik yang tulus demi kepentingan rakyat bawah.

Perlu pula dicatat bahwa suatu gerakan sosial memerlukan jumlah pengikut yang besar, terutama partisipasi rakyat miskin, buruh tani, tunakisma, nelayan, buruh di perkotaan, dan kelompok-kelompok lain yang mau bersatu. Tentu saja identitas kelompok, otonomi, dan tanggung jawab tiap golongan tetap ada.

Atas dasar semua itu, dalam konteks gerakan ini, beberapa tema yang dapat diberi prioritas dalam melakukan studi agraria adalah, misalnya:

1. Bentuk, pola, dan luas/besarnya jaringan.
2. Bentuk, pola, dan luasnya partisipasi rakyat miskin dalam gerakan.

3. Persepsi dan/atau tingkat pemahaman para partisipan mengenai Reforma Agraria.
4. Pola dan gaya kepemimpinan setiap kelompok atau golongan.
5. Program kerja jaringan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Isu-isu apa saja yang diangkat sebagai dasar gerakan.

Itu semua hanya sekedar contoh, yang jika perlu, dapat dikombinasikan, atau masing-masing dikembangkan sesuai kemampuan dan kebutuhan.

Adapun metodenya, sekali lagi, menurut pendapat saya, dua-duanya tipe penelitian tetap diperlukan, yaitu tipe penelitian akademik dan tipe penelitian partisipatoris.

4. Studi Agraria: Mempersiapkan/Mendukung Program RA

Seperti sudah sering saya utarakan (lihat Gunawan Wiradi, 2009b: 115), bagi suatu program RA yang berpeluang untuk berhasil diperlukan sejumlah prasyarat. Dengan demikian, dapat saja setiap prasyarat itu dijadikan tema studi tersendiri (misal: soal kemauan politik; soal pemahaman mengenai RA oleh semua lapisan dari tingkat elit sampai rakyat bawah; soal adanya organisasi rakyat/tani yang kuat; soal dukungan militer; soal terpisahnya elit penguasa dan elit bisnis; dan soal sejauh mana birokrasi kita rapi dan jujur).

Tetapi, di samping semua itu, juga sudah sering saya kemukakan bahwa jika kita memang ingin melaksanakan RA yang genuine, tahap pertama yang harus dilakukan adalah “registrasi tanah” (bukan sertifikasi). Tujuannya adalah untuk memperoleh peta sebaran penguasaan tanah, sehingga diketahui

sejauh mana tingkat ketimpangannya.

Karena itu, jika dikaitkan dengan konteks gerakan sosial, maka setidaknya untuk jangka pendek ke depan, “pemetaan partisipatif” perlu dijadikan “*action research*” dan diperluas secara nasional. Dari sinilah baru nanti dikembangkan studi-studi dengan berbagai topik yang relevan (ingat 15 topik yang telah disinggung di depan).

Sebagai catatan akhir, perlu ditekankan bahwa dalam melakukan keempat agenda penelitian tersebut, tinjauan kesejarahan tidak boleh ditinggalkan. Hal ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai isu yang diteliti.

Demikianlah, dengan uraian dalam bagian ketiga ini mudah-mudahan buku suntingan ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, para peneliti, para dosen, dan siapa saja yang berminat.